**Efektivitas Program SEBASTRA dalam Revitalisasi Bahasa Lampung: Studi Kolaborasi Duta Bahasa dan Balai Bahasa Provinsi Lampung**

**Nikolas Simbolon**

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

[nikolassimbolon675@gmail.com](mailto:nikolassimbolon675@gmail.com)

**Anggita Stevina**

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

[anggitastevina@gmail.com](mailto:anggitastevina@gmail.com)

1. **PENDAHULUAN**

Frasa “Bahasa jiwa bangsa” mungkin tidak asing lagi di telinga. Frasa tersebut bukan hanya fokus pada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tetapi sebagai perekat antara bahasa daerah dan bahasa nasional. Berdasarkan data dari Peta Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, terdapat 718 bahasa daerah yang tersebar di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut memang terdengar banyak dan beragam. Tetapi, berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) tahun 2024, dari 718 bahasa daerah terdapat 18 bahasa daerah berstatus aman, 21 rentan, 3 mengalami kemunduran, 29 terancam punah, 8 kritis, dan 5 punah.

Fenomena pergeseran bahasa (*language shift*) dari bahasa daerah ke bahasa nasional maupun bahasa asing menjadi faktor utama penyebab menurunnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Banyak anak muda yang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang dianggap lebih bergengsi dan bernilai sosial ekonomi tinggi yang pada akhirnya mengabaikan bahasa ibu mereka sendiri sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya (Chandra, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh berkurangnya transmisi bahasa dari orang tua ke anak, lemahnya pengajaran bahasa Lampung di lingkungan sekolah, dan kurangnya bahan ajar serta media pembelajaran yang menarik bagi generasi muda (Rahayu, 2020).

Bahasa Lampung menjadi salah satu dari 29 bahasa dengan status terancam punah. Status ini diperkuat oleh pakar sosiolinguistik Prof Asim Gunawan dalam risetnya pada tahun 1984, dimana hasil dari riset tersebut memprediksi bahasa Lampung akan punah dalam tiga generasi, yang berarti 75 tahun dari tahun 1984 atau 36 tahun dari tahun 2024 sekarang. Bahasa Lampung bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari tradisi, norma, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kehilangan bahasa berarti kehilangan bagian penting dari warisan budaya yang secara tidak langsung juga melemahkan jati diri masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pelestarian bahasa Lampung menjadi masalah penting yang tidak bisa diabaikan, memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Revitalisasi bahasa menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Sama halnya seperti barang yang harus dirawat, maka bahasa daerah juga perlu untuk dipertahankan keberadaannya. Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Pemerintah, terutama melalui Balai Bahasa Provinsi Lampung, memegang peran strategis dalam konservasi bahasa Lampung melalui pembinaan dan pembelajaran bahasa di ruang formal maupun non-formal.

Namun, kesenjangan antara kebijakan pemerintah (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein)* mengindikasikan perlunya strategi baru yang lebih kontekstual. Pemerintah melalui Balai Bahasa memang memiliki peran strategis sebagai institusi formal dalam pembinaan bahasa, tetapi daya jangkaunya terbatas jika hanya mengandalkan pendekatan *top-down*. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang mampu menggabungkan peran negara dengan partisipasi masyarakat sipil. Dalam kerangka teori *collaborative governance* Ansell & Gash (dalam Sartini, 2023) *collaborative governance* merupakan pengaturan yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan dan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan public atau mengelola program atau aset publik. Teori tersebut dalam konteks pelestarian bahasa dapat dipandang sebagai sebuah proses tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas secara sinergis. *Collaborative governance* menekankan pada partisipasi setara, kepercayaan, dan konsensus bersama dalam mencapai tujuan publik. Dengan pendekatan ini, pelestarian bahasa tidak hanya dipandang sebagai tugas negara, tetapi sebagai urusan bersama yang menuntut kolaborasi lintas aktor.

Gap lain adalah minimnya penggunaan bahasa Lampung dalam ranah publik dan media komunikasi modern. Bahasa ini masih belum mendapat ruang yang memadai di media sosial, iklan, maupun media lokal, sehingga kehilangan keberlanjutan penggunaan di ruang publik yang kian didominasi oleh bahasa nasional dan asing (Putri, 2018).

Balai atau Kantor bahasa adalah salah satu lembaga yang menjadi unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen). Balai atau Kantor Bahasa menjadi pondasi penting dalam permasalahan Bahasa yang ada di Indonesia. Selain itu, setiap kantor atau balai bahasa memiliki duta bahasa, duta bahasa adalah organisasi sekaligus mitra balai atau kantor bahasa yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai mitra, duta bahasa bertanggungjawab dalam membantu dan menyukseskan program yang dilakukan oleh kantor atau balai bahasa.

Salah satu program revitalisasi bahasa yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung bersama dengan Duta Bahasa Provinsi Lampung yaitu Semarak Bahasa Dan Sastra (Sebastra). Sebastra adalah program revitalisasi dan penguatan bahasa dalam bentuk perlombaan, program yang ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa ini memberikan peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan, memperkuat, dan melestarikan bahasa daerah dengan pendekatan yang menyenangkan. Program sebastra ini dibuat dan dilakukan dengan kolaborasi yang kuat sehingga dapat tercapai hasil yang baik untuk masyarakat. Kolaborasi antara Balai Bahasa dan Duta Bahasa menjadi model strategis yang menjanjikan. Balai Bahasa dapat menyediakan kerangka kebijakan, pelatihan, dan materi resmi, sementara Duta Bahasa bertindak sebagai pelaksana di lapangan yang menggerakkan aktivitas literasi, budaya, dan sosial melalui program kreatif.

Melihat fenomena diatas, penulis ingin mendalami lebih lanjut dan mengetahui bagaimana efektivitas program Sebastra yang dilakukan oleh Duta Bahasa dan Balai Bahasa Provinsi Lampung dalam upaya revitalisasi bahasa Lampung. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas program melalui kolaborasi antara Balai Bahasa Provinsi Lampung dan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Kajian ini tidak hanya penting dalam perspektif kebudayaan, tetapi juga melihat model tata kelola kolaboratif dalam menjaga warisan budaya. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan pola kolaborasi yang mampu memperkuat keberlangsungan bahasa Lampung sehingga tetap eksis dan relevan di tengah derasnya arus globalisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Chandra, Z. (2023). Analisis Kurikulum Merdeka: Mampukah Merevitalisasi Bahasa Daerah?. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, *2*(6), 28-38. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/download/565/112>

Fahreza, M. M. Y., Robbani, A., & Fahri, A. (2024). Menyatukan Tradisi dan Teknologi: Pelestarian Budaya Lampung dalam Kerangka Pendidikan Berkelanjutan di Era SDGs. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 1990-1998. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15181>

Ibrahim, I., Syah, W., & Firmansah, M. (2024). Pelestarian Bahasa Daerah Berbasis Literasi Digital Bagi Masyarakat Desa. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 116-124. <https://amalilmiah.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/293>

Khalizah, S., Trya, N., Prayogi, R., & Riadi, B. (2024). MUATAN LOKAL BAHASA LAMPUNG DI SEKOLAH SEBAGAI STRATEGI PEMERTAHANAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH. *Saka Bahasa: Jurnal Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya*, *1*(1), 27-34. <https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/download/11201/7904>

Putri, N. W. (2018). Pergeseran bahasa daerah Lampung pada masyarakat kota Bandar Lampung. *Prasasti: Journal of Linguistics*, *3*(1), 83-97. <https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/download/6810/4111>

Rahayu, R. (2020). Pelaksanaan mulok bahasa Lampung dalam upaya pelestarian bahasa Lampung di Kabupaten Lampung Selatan. *Kelasa*, *15*(1), 46-63. <http://kelasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/kelasa/article/download/90/74>

Sartini, I. (2023). *Kolaborasi Pemerintahan (Collaborative Governance) Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Soppeng* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Rentang tahun kepunahan bahasa, hasil dari program tersebut, dampaknya cara mencapai dampaknya di hasil uud dari balai bahasa,